

**ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali)**

**MEVIANA SUSILOWATI
B200080114**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

ABSTRAKSI

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Anggaran yang dikelola berdasarkan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu unsur dalam organisasi pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ketersediaan anggaran terhadap kinerja memang tidak dapat dibantahkan lagi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh belanja daerah yang terdiri dari belanja PNS, belanja pegawai honorer, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap capaian kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 42 SKPD yang bersumber dari Laporan Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 untuk mendapatkan data belanja daerah dan Laporan Evaluasi Semester II Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 untuk mendapatkan data nilai capaian kegiatan kelompok SKPD Kabupaten Boyolali, menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.

Hasil pengujian menunjukkan Belanja Pegawai Negeri Sipil, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 43,9% variasi variabel dependen (Capaian Kinerja Instansi Pemerintah) dijelaskan oleh variabel dependen (Belanja PNS, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan sisanya 56,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Alokasi belanja PNS (belanja tidak langsung) lebih besar dari alokasi belanja langsung. Belanja Langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.

Kata kunci: Belanja Pegawai Negeri Sipil, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Ringkasan APBD, Nilai Capaian Kegiatan Kelompok SKPD

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus pada SKPD di Boyolali)”

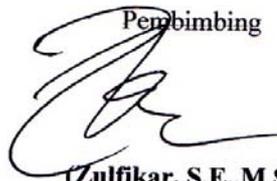
Yang ditulis oleh:

MEVIANA SUSILOWATI
B 200 080 114

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2012

Pembimbing



(Zulfikar, S.E., M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah. (Vegirawati, 2012: 65).

Mahmudi (2009) menyatakan bahwa jika dilihat dari hubungan belanja dengan suatu aktivitas, maka belanja dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan, yang meliputi: belanja tenaga kerja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal, yang kedua adalah belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan, yang termasuk dalam belanja ini adalah: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Lingkup APBD menjadi penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui APBD, sehingga APBD sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran (Ekawarna, et al. 2009: 50).

Terkait dengan prestasi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan untuk dilakukan penilaian atas prestasi kerja dengan menggunakan tolak ukur, indikator dan target kinerja. Hasil akhir atas penilaian kinerja adalah capaian-capaian kinerja yang diformulasikan dalam bentuk ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dan efisiensi terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan efektivitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar penyerapan belanja daerah di Kabupaten Boyolali. Untuk itu skripsi ini mengambil judul: **“Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali)”**.

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 50 huruf a Permendagri no. 13 Tahun 2006) untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Keberadaan belanja langsung merupakan konsekuensi adanya program atau kegiatan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja (tingkat pencapaian program/kegiatan) yang diharapkan (Mardiasmo, 2002: 95).

Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung menurut Permendagri 13/2006 pasal 37 terdiri: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga.

Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program/kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (setiap bulan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum (Mahmudi, 2009: 97).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian berdasarkan indikator sebagai berikut: a) Masukan (*input*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan besaran sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan; b) Keluaran (*output*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan; c) Hasil (*outcome*) adalah tolak ukur kinerja

berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan tingkat keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam rangka melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang. Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai Negeri Sipil terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang pengaruh kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja sulit diukur. Penganggaran belanja tidak langsung mempertimbangkan asas ekonomis, efisien, dan efektif. Jenis belanja yang termasuk dalam belanja tidak langsung terdiri: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja barang dan jasa, belanja tak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan SAB anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai capaian kegiatan/capaian kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1: Belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah.

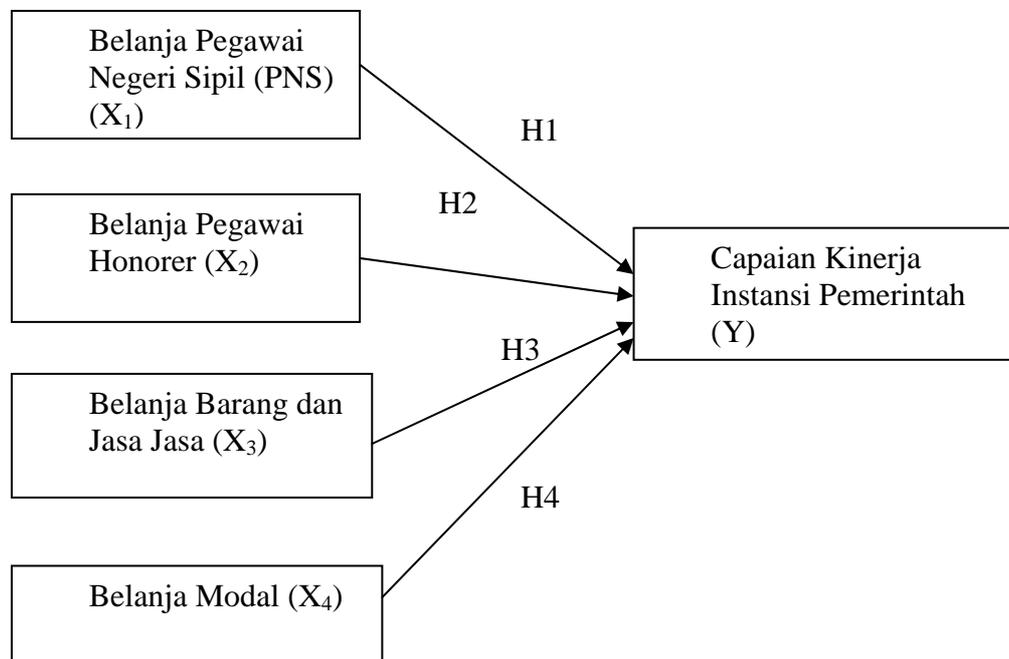
Pengaruh Belanja Langsung terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan satuan kerja unit daerah yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Jenis belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dianggarkan untuk kegiatan yang keluarannya tidak menambah aset daerah. Belanja modal dianggarkan untuk kegiatan yang keluarannya menambah aset daerah. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dapat dianggarkan secara sekaligus untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai prestasi kerja yang ditetapkan.

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja langsung akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai capaian kegiatan/capaian kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut:

- H2: Belanja Pegawai Honorer berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah
- H3: Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah
- H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen di Laporan Ringkasan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2010 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali diperoleh data belanja daerah yaitu Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung), Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal (Belanja Langsung). Nilai Capaian Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh dari Nilai Capaian Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber dari data Laporan Evaluasi Semester II Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 Sampai Dengan Desember

2010. Metode pengumpulan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Analisis

Model empirik tersebut adalah model estimasi untuk data panel. Penerapan dalam penelitian ini dilakukan untuk daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y	= Nilai Capaian Kegiatan SKPD
α	= <i>Intercept</i> persamaan Regresi
β	= koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
X₁	= Belanja Pegawai Negeri Sipil
X₂	= Belanja Pegawai Honoror
X₃	= Belanja Barang dan Jasa
X₄	= Belanja Modal
e	= koefisien error

Persamaan di atas adalah bentuk model dasar untuk analisis empiris dengan menggunakan data panel untuk keperluan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda model *log linier* dengan tujuan untuk menyamakan satuan data, memperkecil variasi data, menghindari penyakit multikolinearitas, dan memperbaiki hasil regresi, maka model estimasinya dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln} X_1 + \beta_2 \text{Ln} X_2 + \beta_3 \text{Ln} X_3 + \beta_4 \text{Ln} X_4 + e$$

Dimana:

Y	= Nilai Capaian Kegiatan SKPD
α	= <i>Intercept</i> persamaan Regresi
β	= koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
X₁	= Belanja Pegawai Negeri Sipil
X₂	= Belanja Pegawai Honoror
X₃	= Belanja Barang dan Jasa
X₄	= Belanja Modal
e	= koefisien error
Ln	= Logaritma Natural (persen)

ANALISIS DATA

Uji Normalitas

Dalam penelitian untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirno*. Adapun kriteria uji *Kolmogorov-Smirno* yaitu jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima atau data residual berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak atau data residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,067, hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi > 0,05, berarti H₀ diterima atau data residual berdistribusi normal.

Analisis Regresi Berganda

Uji F adalah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah Belanja Pegawai Negeri Sipil, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan analisis diperoleh F_{hitung} sebesar 9,735 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya Belanja Pegawai Negeri Sipil, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Hasil perhitungan untuk nilai *adjusted* R^2 dengan bantuan program SPSS dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi yang disesuaikan atau *adjusted* R^2 sebesar 0,460. Hal ini berarti 46% variasi perubahan capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali dijelaskan oleh variasi Belanja Pegawai Negeri Sipil, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara sisanya sebesar 54% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi.

Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Hasil

Hipotesis 1 : Belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

Analisis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,299 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,767 atau lebih besar dari 0,05. maka H_0 diterima berarti variabel belanja PNS tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Hipotesis 2 : Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

Dari hasil regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 1,605 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,117 atau lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima berarti variabel belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Hipotesis 3 : belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

Dari hasil regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 0,922 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,362 atau lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima berarti variabel belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

Hipotesis 4 : belanja modal berpengaruh positif terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

Dari hasil regresi diperoleh t_{hitung} sebesar -0,565 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,576 atau lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima berarti variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja instansi pemerintah pada tahun 2010 yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, tidak ditemukan masalah multikolinieritas, tidak ditemukan masalah heterokedastisitas dalam model, tidak ditemukan masalah autokorelasi dalam model dan hasil uji normalitas menunjukkan data residual berdistribusi normal.
2. Hipotesis pertama tidak terbukti, bahwa hasil pengujian pengaruh belanja Pegawai Negeri Sipil terhadap capaian kinerja dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 0,767 pada taraf 5%, maka peneliti menyatakan bahwa pengaruh belanja Pegawai Negeri Sipil terhadap capaian kinerja tidak berhasil didukung oleh statistik.
3. Hipotesis kedua tidak terbukti, bahwa hasil pengujian pengaruh belanja pegawai terhadap capaian kinerja dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 0,125 pada taraf 5%, maka peneliti menyatakan bahwa pengaruh belanja pegawai terhadap capaian kinerja tidak berhasil didukung oleh statistik.
4. Hipotesis ketiga tidak terbukti, bahwa hasil pengujian pengaruh belanja barang dan jasa terhadap capaian kinerja dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 0,392 pada taraf 5%, maka peneliti menyatakan bahwa pengaruh belanja barang dan jasa terhadap capaian kinerja tidak berhasil didukung oleh statistik.
5. Hipotesis keempat tidak terbukti, bahwa hasil pengujian pengaruh belanja modal terhadap capaian kinerja dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 0,583 pada taraf 5%, maka peneliti menyatakan bahwa pengaruh belanja modal terhadap capaian kinerja tidak berhasil didukung oleh statistik.
6. Hasil koefisien determinasi atau *adjusted R²* sebesar 0,439. Hal ini berarti 43,9% variasi perubahan capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boyolali dijelaskan oleh variasi belanja pegawai negeri sipil, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara sisanya sebesar 56,1% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi.
7. Alokasi PNS (Belanja Tidak Langsung) seluruh SKPD dalam sampel penelitian ini sebesar Rp. 657.559.451.000, sedangkan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal (Belanja Langsung) sebesar Rp. 219.407.875.000. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa alokasi Belanja Tidak Langsung lebih besar daripada Belanja Langsung. Kesimpulannya telah terjadi kesalahan penganggaran pada pemerintahan Kabupaten Boyolali sehingga Belanja Publik selalu kurang dari pada Belanja Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Laporan Evaluasi Semester II Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 Sampai Dengan Desember 2010 dan pada Laporan Ringkasan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2010. Peneliti hanya mengambil Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai populasi dalam penelitian ini. Periode dalam penelitian ini hanya 1 tahun yaitu tahun 2010. Dari beberapa keterbatasan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk peneliti yang akan meneliti dengan tema penelitian yang sama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja SKPD lebih baik dan akurat dilakukan penelitian dalam beberapa kurun waktu (*time series*) dan dilakukan penelitian yang terfokus secara mendetail terhadap SKPD meliputi program/kegiatan serta anggaran yang dialokasikan untuk tiap-tiap program/kegiatan kemudian dianalisis dengan nilai capaian kegiatan tiap programnya SKPD yang terkait selama beberapa tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,439, menunjukkan kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya hanya 43,9%. Jadi pengaruh keempat variabel masih sangat kecil, oleh karena itu bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah jumlah variabel bebas dan tidak mengikutsertakan variabel yang tidak signifikan, agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bau, Maria Yunitha. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2005-2009*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). UPN"Veteran": Yogyakarta.
- Christy, Fhino Andrea, dan Priyo Hari Adi. 2009. *hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia*. National Conference UKWMS, Surabaya, 10 Oktober 2009.
- Ekawarna, shita unjaswati, Iskandar sam, dan Sri Rahayu. 2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Februari 2009, hal 49-66.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

- Sulistiyowati, Firma. 2005. *Pengaruh Penghasilan Terhadap Efektivitas Kinerja Kepala Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansnsi dan Keuangan Sektor Publik Vol. 06, No. 01, Hal: 27-54.
- Vegirawati, Titin. 2012. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1, Januari 2012 hal: 65-74.
- Yuwono, Sony T.A Indrajaya dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Cetakan Pertama*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Laporan Evaluasi Semester II Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 dalam: BAPPEDA BOYOLALI TAHUN 2011.
- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2010 dalam: DPPKAD BOYOLALI TAHUN 2011.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.